

# **Bupati Bombana Terima Penghargaan OJK, Bukti Nyata Gerakan Literasi Keuangan yang Masif di Daerah**

**Bombana, sultranet.com** - Semangat membangun kesadaran keuangan masyarakat kembali membuahkan hasil manis bagi Kabupaten Bombana. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menerima Penghargaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Award 2025 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai “Pemerintah Daerah Penggerak Literasi Keuangan Termasif” di Sulawesi Tenggara. Penghargaan bergengsi itu diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, pada Opening Ceremony Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 di Pelataran ex MTQ Kendari, Sabtu (25/10/2025).

Penghargaan ini menempatkan Bombana sejajar dengan Kabupaten Wakatobi dan Konawe Selatan yang juga menerima apresiasi dari OJK atas kategori berbeda. Ketiganya dinilai sebagai daerah yang konsisten mendorong literasi keuangan, menjadi contoh bagi kabupaten lain di Sulawesi Tenggara dalam memperkuat kesadaran dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menekankan pentingnya literasi keuangan dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak hanya terjebak pada pola konsumsi, tetapi juga mengarahkan keuangan untuk hal yang produktif.

“Ekonomi mikro harus bergerak serentak, tapi butuh pendampingan agar manfaatnya dirasakan luas,” ujarnya.

Pernyataan itu sejalan dengan visi OJK Sultra yang terus memperluas jangkauan literasi dan inklusi keuangan hingga ke desa-desa. Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, mengatakan bahwa lembaganya berkomitmen menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai daerah dengan masyarakat yang cerdas finansial.

“Dengan semangat gerakan nasional cerdas keuangan, kami menargetkan Sultra cerdas finansial, Sultra sejahtera,” tegas Bismi.

Bulan Inklusi Keuangan 2025 mengusung tema “Inklusi Keuangan untuk Semua,

Rakyat Sejahtera Indonesia Maju.” Kegiatan ini menjadi momentum nasional untuk mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya akses keuangan yang merata. Tak hanya seremonial, kegiatan ini juga menghadirkan pameran layanan keuangan, gerakan pangan murah, edukasi UMKM, BIK Night Run, senam zumba, serta berbagai layanan finansial bagi masyarakat dari berbagai lapisan.

OJK menggandeng sejumlah lembaga keuangan, perbankan, dan pemerintah daerah agar kegiatan literasi keuangan tidak berhenti di kota besar. Kabupaten Bombana, misalnya, menjadi salah satu contoh sukses karena aktif melibatkan masyarakat desa, pelajar, pelaku UMKM, hingga komunitas perempuan dalam program inklusi keuangan.

Upaya tersebut sejalan dengan visi Bupati Burhanuddin yang menempatkan literasi keuangan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana melalui berbagai dinas teknis terus mengencangkan edukasi keuangan berbasis masyarakat agar warga semakin melek finansial, mampu menabung, berinvestasi, dan mengelola usaha dengan bijak.

“Penghargaan ini bukan sekadar simbol, tapi bukti nyata bahwa gerakan literasi keuangan di Bombana berjalan dan dirasakan masyarakat,” ujar Burhanuddin usai menerima penghargaan. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus bersinergi dengan OJK dan lembaga perbankan dalam memperluas jangkauan edukasi keuangan.

Acara pembukaan BIK 2025 berlangsung meriah dan penuh semangat. Hadir pula Anggota DPD RI, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Ketua FKIIJK Sultra, unsur Forkopimda, serta para kepala daerah dari berbagai kabupaten di Sulawesi Tenggara.

Momentum BIK 2025 diharapkan menjadi titik tolak untuk memperkuat budaya melek finansial di masyarakat. Dari desa hingga kota, semangat literasi keuangan kini tumbuh menjadi gerakan bersama demi mewujudkan masyarakat Sultra yang mandiri dan sejahtera.

**Pewarta: Makrum**

---

# Bombana Raih Penghargaan Literasi Keuangan Termasif di BIK 2025

**Kendari, sultranet.com** - Pemerintah Kabupaten Bombana kembali mencatat prestasi pada ajang Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 setelah Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menerima BIK Award 2025 kategori "Pemerintah Daerah Penggerak Literasi Keuangan Termasif" dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, pada Opening Ceremony BIK di Pelataran eks MTQ Kota Kendari, Sabtu (25/10/2025).

Penghargaan serupa juga diberikan kepada Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Konawe Selatan dengan kategori berbeda. Ketiganya dinilai berhasil mendorong inklusi keuangan di daerah masing-masing melalui program edukasi dan peningkatan akses layanan keuangan bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa literasi dan inklusi keuangan merupakan fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa masyarakat perlu diarahkan untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan.

"Jangan hanya konsumtif. Arahkan keuangan pada hal yang produktif seperti investasi dan pengembangan usaha," ujarnya.

Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai daerah dengan masyarakat yang cerdas mengelola keuangan.

"Dengan semangat gerakan nasional cerdas keuangan, kami menargetkan Sultra cerdas finansial, Sultra sejahtera. Tidak ada satu pun keluarga yang tertinggal. Semangat kami adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat," tegas Bismi.

BIK 2025 mengusung tema “Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju.” Agenda tahunan OJK ini digelar selama dua hari dengan rangkaian kegiatan seperti pameran layanan keuangan, gerakan pangan murah, edukasi UMKM, BIK Night Run, Zumba, hingga layanan pembukaan rekening dan akses pembiayaan.

Acara pembukaan dihadiri oleh Anggota DPD RI, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Ketua FKIIJK Sultra, unsur Forkopimda, para bupati dan perwakilan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara.

Penghargaan yang diterima Bombana dinilai sebagai capaian penting dalam upaya pemerintah daerah memperkuat budaya melek keuangan. Selama dua tahun terakhir, Bombana aktif menggandeng lembaga jasa keuangan, perguruan tinggi, hingga kelompok UMKM untuk memperluas akses layanan keuangan digital, mendorong pembentukan rekening pelajar, dan memperkuat literasi investasi masyarakat.

Sebagai daerah dengan potensi sektor pertanian dan UMKM yang berkembang, penguatan edukasi keuangan dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Bombana.

---

## **Pegadaian Syariah dan Pemkab Bombana Dorong ASN Melek Investasi dan Perencanaan Haji**

**Bombana, sultranet.com** - Pemerintah Kabupaten Bombana bekerja sama dengan PT Pegadaian Area Sulawesi Tenggara melalui Unit Pelayanan Syariah (UPS) Bombana menggelar seminar literasi keuangan syariah bertema “*Perencanaan Investasi dan Pembiayaan Haji melalui Pegadaian Syariah*”. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Kantor Bupati Bombana dan diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Daerah.

Selasa, 7 Oktober 2025.

Seminar tersebut menjadi tindak lanjut dari surat permohonan PT Pegadaian Cabang Bombana nomor 22/60311/SL/2025 tentang kegiatan literasi keuangan bersama ASN. Tujuannya, memperkenalkan berbagai layanan investasi berbasis syariah yang aman dan menguntungkan, sekaligus membantu ASN mengelola keuangan mereka secara bijak dan berkelanjutan.

Deputy Bisnis PT Pegadaian Area Sulawesi Tenggara, H. Rustam, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam penyelenggaraan kegiatan edukatif ini.

“Kami ingin Pegadaian hadir lebih dekat dengan masyarakat, khususnya ASN, agar mereka bisa memanfaatkan layanan keuangan syariah yang aman dan mudah. Program Tabungan Emas dan Pembiayaan Haji adalah bentuk komitmen kami membantu masyarakat mencapai kemandirian ekonomi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pegadaian tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Melalui program berbasis syariah, Pegadaian berupaya memperluas pemahaman masyarakat terhadap investasi yang beretika dan sesuai prinsip Islam.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang hadir membuka kegiatan tersebut, menyambut baik inisiatif Pegadaian. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, di mana kesadaran untuk berinvestasi dan menabung secara produktif semakin meningkat.

“Kesadaran untuk berinvestasi dan merencanakan ibadah haji secara mandiri kini makin tumbuh. Program Tabungan Emas dan Pembiayaan Haji dari Pegadaian adalah inovasi yang membantu masyarakat mengelola keuangan dengan bijak dan terencana,” katanya.

Ahmad Yani juga menekankan bahwa investasi emas bukan semata soal keuntungan, tetapi juga tentang menjaga ketahanan ekonomi keluarga di tengah dinamika perekonomian global. Ia menilai, perencanaan keuangan yang baik merupakan pondasi penting bagi kesejahteraan dan stabilitas rumah tangga ASN.

“Merencanakan ibadah haji bukan hanya tentang kemampuan finansial, tapi juga

kesiapan spiritual dan kedisiplinan dalam menabung. Melalui kegiatan ini, saya berharap ASN Bombana bisa lebih sadar pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat,” tambahnya.

Kegiatan seminar menghadirkan pemateri utama Ummu Rachmah, M.SE., SPV BPO Sales PT Pegadaian. Dalam paparannya, ia menjelaskan secara rinci produk unggulan Pegadaian Syariah, seperti *Tabungan Emas*, *Arrum Haji*, dan *Gadai Aman Syariah*. Ia juga memberikan tips praktis tentang bagaimana mengatur keuangan pribadi dan keluarga berdasarkan prinsip syariah.

“Pegadaian Syariah hadir untuk memberikan solusi finansial yang sesuai nilai Islam, namun tetap kompetitif dan mudah diakses. Melalui Tabungan Emas, masyarakat bisa mulai berinvestasi dari nominal kecil, tapi memberi manfaat besar di masa depan,” tutur Ummu.

Ia menambahkan, edukasi seperti ini penting agar ASN dan masyarakat umum lebih memahami bahwa investasi syariah bukan hanya tentang menghindari riba, tetapi juga tentang membangun perencanaan keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap, melalui kegiatan ini, ASN dapat menjadi pelopor dalam penerapan literasi keuangan di lingkungan kerja maupun masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah dan Pegadaian diharapkan terus berlanjut untuk memperluas akses edukasi dan layanan keuangan syariah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung dengan suasana interaktif tersebut menandai langkah nyata dalam membangun budaya menabung, berinvestasi, dan merencanakan masa depan secara cerdas di Kabupaten Bombana.

---

# **Bupati Bombana Launching**

# Program “Berani Menabung” untuk Generasi Cerdas Keuangan

**Bombana, sultranet.com** - Pemerintah Kabupaten Bombana resmi melaunching program “Berani Menabung” yang dirangkaikan dengan kegiatan edukasi keuangan bagi pelajar melalui program *Kejar Emas* (Satu Rekening, Satu Pelajar, Generasi Bombana Cerdas Keuangan). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si di Auditorium Tanduale, Rabu (20/8/2025).

Acara ini dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, jajaran Forkopimda, Pj. Sekda Bombana, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Kantor Perwakilan LPS III Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, pimpinan perbankan wilayah Bombana, para kepala OPD, kepala sekolah, anggota TPAKD serta ratusan pelajar dari tingkat SD, SMP, hingga SMA se-Kecamatan Rumbia dan Rumbia Tengah.

Launching ditandai dengan penyerahan buku tabungan secara simbolis kepada pelajar yang hadir. Total sebanyak 8.140 rekening dibagikan melalui lima perbankan, yaitu Bank Sultra (7.220 rekening), Bank Bahteramas (748 rekening), BRI (60 rekening), BNI (60 rekening), dan Bank Muamalat (52 rekening).

Selain penyerahan rekening, para pelajar juga mendapatkan edukasi keuangan yang dikemas secara interaktif untuk meningkatkan pemahaman sejak dini mengenai pentingnya literasi keuangan dan budaya menabung.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menekankan pentingnya membangun kesadaran menabung bukan hanya bagi pelajar, melainkan seluruh lapisan masyarakat.

“Program Berani Menabung ini hendaknya menjadi motivasi besar bagi generasi muda Kabupaten Bombana untuk membudayakan kebiasaan menabung. Ke depan, budaya menabung ini diharapkan tidak hanya menjadi sasaran pelajar, tetapi juga diterapkan oleh mahasiswa, pemuda, guru, ibu rumah tangga, pelaku UMKM, kelompok tani, hingga masyarakat luas,” ujarnya.

Burhanuddin juga menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan seluruh pihak yang bersinergi bersama Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Menurutnya, kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam memperluas akses keuangan masyarakat Bombana.

Ia menambahkan, budaya menabung yang dibangun sejak dini dapat menjadi bekal penting untuk mempersiapkan masa depan generasi muda. “Dengan menabung, masyarakat tidak hanya belajar mengelola uang, tetapi juga belajar disiplin, merencanakan kebutuhan, dan menyiapkan masa depan yang lebih baik,” kata Burhanuddin.

Program ini juga sejalan dengan target nasional untuk mendorong inklusi keuangan hingga ke daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menabung sebagai bagian dari perencanaan hidup, sekaligus mendukung peningkatan literasi keuangan di tingkat lokal.

Di sela acara, para pelajar yang menerima buku tabungan tampak antusias. Beberapa guru yang mendampingi siswa juga menyambut positif langkah pemerintah ini. Mereka menilai program menabung sejak dini dapat mengubah pola pikir anak dalam mengelola keuangan dan membiasakan sikap hemat.

Dengan program “Berani Menabung” melalui *Kejar Emas*, Kabupaten Bombana meneguhkan komitmen menghadirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran finansial yang kuat.

---

## **Pj Gubernur Sultra Minta OJK Perkuat Literasi Keuangan dan**

# Lindungi Masyarakat dari Pinjol Ilegal

**Kendari, sultranet.com** - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat literasi keuangan dan melindungi masyarakat dari investasi serta pinjaman online ilegal. Hal ini ia sampaikan dalam acara pengukuhan Kepala OJK Provinsi Sultra yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa (18/02/2025).

Andap menyampaikan selamat kepada Bismi Maulana Nugraha yang resmi menjabat sebagai Kepala OJK Provinsi Sultra, menggantikan Arjaya Dwi Raya. Ia juga mengapresiasi dedikasi Arjaya selama lima tahun terakhir.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Sultra, kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan. Semoga sukses di tempat yang baru,” ujar Andap.

Dalam sambutannya, Andap menekankan pentingnya sinergi antara OJK dan pemerintah daerah untuk memperkuat sektor keuangan di Sultra. Ia mengingatkan agar OJK tidak hanya berperan dalam pengawasan, tetapi juga berkontribusi nyata dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

“Kami berharap OJK lebih aktif dalam edukasi keuangan agar masyarakat terhindar dari investasi ilegal dan pinjaman online yang merugikan,” kata Andap.

Ia juga menyoroti perlunya integrasi digital dalam sistem keuangan daerah serta pengawasan ketat terhadap industri jasa keuangan demi menjaga stabilitas sektor riil, termasuk UMKM.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menegaskan bahwa OJK memiliki tugas tambahan dalam mengembangkan sektor jasa keuangan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi, tetapi juga harus menguatkan dan mengembangkan sektor keuangan. Sinergi antara OJK dan pemerintah daerah sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujar

Mahendra.

Mahendra juga mengapresiasi pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Sultra, yang terdiri dari satu TPAKD tingkat provinsi dan 17 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Ia menilai langkah ini dapat mempercepat inklusi keuangan dan mendukung sektor UMKM.

Di akhir acara, Andap menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kerja OJK serta melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal.

“Kami akan terus bersinergi dengan OJK dalam upaya perlindungan masyarakat serta pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah,” tutupnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Forkopimda Sultra, Sekretaris Daerah, pejabat OJK pusat dan daerah, pimpinan BI, serta perwakilan BUMN dan BUMD di Sultra.

---

## **Pj Gubernur Minta OJK Sultra Baru Lindungi Warga dari Investasi dan Pinjol Ilegal**

**Kendari, SultraNet.com** - Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lebih aktif melindungi masyarakat dari praktik investasi bodong dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang meresahkan. Permintaan itu disampaikan saat menghadiri acara pengukuhan Kepala OJK Provinsi Sultra yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa, 18 Februari 2025.

Dalam kegiatan tersebut, Bismi Maulana Nugraha resmi menjabat sebagai Kepala OJK Provinsi Sultra menggantikan Arjaya Dwi Raya yang telah bertugas sejak 2020. Acara pengukuhan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, doa bersama, pemutaran kaleidoskop kegiatan OJK, dan dilanjutkan dengan

sambutan dari pejabat yang hadir.

Andap mengucapkan selamat datang kepada Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar beserta jajaran, serta menyampaikan apresiasi atas dedikasi Arjaya Dwi Raya selama lima tahun terakhir memimpin OJK di wilayah Sultra.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Sultra, kami menyampaikan terima kasih atas pengabdian, dedikasi, dan kontribusi yang telah diberikan. Semoga Bapak Arjaya dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan,” kata Andap dalam sambutannya.

Ia juga menyambut hangat Kepala OJK Sultra yang baru. “Selamat datang di Bumi Anoa. Semoga dapat mengemban amanah dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta sektor jasa keuangan di Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Andap menyampaikan lima pesan penting kepada Kepala OJK yang baru. Pertama, OJK diminta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat untuk mengurangi risiko terjebak pada praktik keuangan ilegal, sesuai Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2023.

“Kami ingin masyarakat Sultra terlindungi dari investasi ilegal dan pinjaman daring ilegal. Prinsip kami jelas: *Salus Populi Suprema Lex Esto*, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” tegasnya kepada media usai acara.

Kedua, Andap menekankan pentingnya berbagi informasi antara OJK dan pemerintah daerah agar langkah pengawasan keuangan digital lebih tepat sasaran. Ketiga, ia mengingatkan bahwa sinergi antara OJK, pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar jargon.

Pesan keempat, ia meminta pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan secara intensif untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi riil, termasuk UMKM. “Integritas industri jasa keuangan sangat menentukan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Terakhir, ia menekankan agar literasi keuangan tidak hanya dijangkau di kota, tapi hingga pelosok jazirah Sultra. “Literasi yang merata akan mencegah masyarakat dari jerat keuangan yang menipu,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa OJK kini memiliki mandat tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi, tapi juga harus mampu mengembangkan sektor jasa keuangan. Ini sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi daerah,” ungkap Mahendra.

Ia menambahkan, OJK mendorong pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai bagian dari strategi inklusi keuangan. Provinsi Sultra, menurutnya, telah menunjukkan komitmen nyata dengan membentuk satu TPAKD di tingkat provinsi dan 17 TPAKD di tingkat kabupaten/kota.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan OJK adalah kunci untuk memperkuat stabilitas keuangan, mendukung UMKM, dan meningkatkan literasi serta inklusi keuangan di seluruh daerah,” katanya.

Pengukuhan Kepala OJK Provinsi Sultra ini juga dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tingkat I Sultra, Sekretaris Daerah dan jajaran pimpinan tinggi Pemprov Sultra, Deputi Komisiner OJK, Kepala OJK Sulselbar, Kepala Perwakilan BI, Plt Kepala BPS, serta pimpinan BUMN dan BUMD di Sultra.